

MENGANALISIS PERJUANGAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DALAM MERAWAT DEMOKRASI INDONESIA

Dwi Ayu Suetha¹, Anny Wahyuni², Budi Purnomo³

suethaayu@gmail.com¹, annywhn@gmail.com², purnomobudi9062@gmail.com³

Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Jambi

Abstrak: Susilo Bambang Yudhoyono atau sering kita panggil SBY adalah salah satu sang demokrat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Perjuangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Merawat Demokrasi Indonesia. SBY sendiri merasa banyak hal yang harus dilakukan dalam penyelamatan dan pengembangan Indonesia dari keterpurukan harus menjadi tema terbesar memasuki reformasi tahap kedua, menurut SBY penyelamatan ini menjadi tugas pemimpin negara. Karena Untuk merawat dan membangun kembali Indonesia menurut pandangan SBY sangat membutuhkan pemerintahan yang kuat, transparan dan akuntabel. Dimana pemerintah harus dapat merespon aspirasi rakyat menjadi program yang berbentuk, karena rakyat pantas untuk mengetahui semua kegiatan pemerintah. Pemerintah pun tidak boleh bekerja didalam ruangan tertutup dan terpisah dengan lingkungan masyarakat luas, kecuali hal yang bersifat rahasia negara.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode history atau metode sejarah dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan SBY dalam merawat demokrasi Indonesia.

Kata Kunci : Menganalisis Perjuangan SBY dalam Merawat Demokrasi Indonesia.

Abstract: Susilo Bambang Yudhoyono or we Often call him SBY is one of the democrats. The purpose of this study is to analyze the struggle of Susilo Bambang Yudhoyono in maintaining Indonesia democracy. SBY himself feels that there are many things that need to be done to save and develop Indonesia from adversity and must be the biggest theme of entering the second phase of reform, according to SBY, this rescue is the duty of the state leader. Because in order to maintain and rebuild Indonesia in SBY's view, it is very necessary to have a strong, transparent and accountable government. Where the government must be able to respond to the aspirations of the people into a from of program, because the people deserve to know all government activities. The government is also not allowed to work in a closed room and separate from the community, except for things that are state secrets.

This research is a qualitative research using the historical method or the historical method with a literature study approach, this study aims to analyze SBY's struggles in caring for Indonesian democracy.

Keywords: Analyze SBY's Struggle in Maintaining Indonesian Democracy

Pendahuluan

Di Indonesia sudah banyak yang menerapkan sistem pemerintahan pada awalnya. Tetapi dari banyaknya sistem pemerintahan yang bertahan di era reformasi 1998 sampai dengan saat ini merupakan sistem pemerintahan demokrasi. Walaupun masih terdapat kekurangan dan tantangan, namun beberapa kelompok telah merasa merdeka dengan di berlakukannya sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Yang berarti kebebasan pers telah menduduki ruang yang sebebaskan-bebasnya hingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing.

Demokrasi berasal dari kata “Demos dan Kotos” memiliki arti bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat dimana pemerintah (Presiden) ditunjuk atau dipilih langsung dari para wakil rakyat, oleh karena itu pemerintahan tertinggi berada dari tangan rakyat. Demokrasi dikembangkan untuk memenuhi partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Demokrasi sendiri mencakup kondisi sosial, ekonomi dan juga budaya yang memungkinkan adanya kebebasan politik dan setara. Demokrasi Indonesia sendiri perlu dilihat dan disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Namun menjaga dan merawat demokrasi dalam negara tidaklah mudah. Karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, agar letak politik demokrasi negara tetap berada pada posisinya, yang sesuai dengan nilai-nilai dan aturan hukum demokrasi.

Seorang tokoh lahir krena momentum, tetapi juga banyak karena sikap, pemikiran dan gagasan-gagasannya, namun ada juga yang lahir dari proses dan rektrumen kepemimpinan. Tetapi banyak tokoh yang nasional yang lahir karena memenuhi salah satu dari ketiga aspek tersebut, namun ada juga yang lahir karena ketiga aspek tersebut, lain halnya dengan tokoh ini, meskipun belum mencapai puncak kursi kepresidenan tetapi telah memenuhi ketiga aspek tersebut, tokoh itu tak lain adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih kita kenal dengan SBY.

SBY adalah seorang tokoh yang ikut mendorong dan mengelola reformasi, SBY merasa banyak hal yang telah dicapai oleh bangsa ini, namun ada juga beberapa hal yang harus dibenahi, supaya reformasi yang telah berjalan selama enam tahun berada pada tempat yang benar. sebagai seorang menko polkam ia merasakan reformasi tahap pertama yaitu tahun 1998-2004 semangat bangsa saat menghadapi demokrasi sangatlah membara, namun didalam proses itu tidak jarang menimbulkan beberapa hal yang negatif pula dalam hal pengimplikasiannya. tetapi hal tersebut tidak boleh dibiarkan. Memasuki tahun 2004 memberi SBY kesempatan untuk melakukan evaluasi, refleksi dan koreksi. Untuk mengetahui sejauh mana reformasi ini berjalan dan bagaimana merumuskan langkah kedepannya.

Menurut SBY, proses reformasi didalam berbagai bidang kehidupan yang telah sesuai dengan cita-cita reformasi tentu harus dilanjutkan, jika proses reformasi menimbulkan dampak negatif tentu SBY tidak akan membiarkannya begitu saja, harus ada cara untuk melakukan pembenahan, dan pada saat memasuki reformasi tahap kedua yaitu

2004-2009 bangsa dapat membangun kembali dari reruntuhan krisis yang sampai saat ini masih dirasakan. SBY mengatakan reformasi tidak bisa dilakukan seperti membalik telapak tangan melainkan butuh waktu, karena tidak bisa mengharapkan hasil yang begitu cepat, dikarenakan reformasi mengandung perubahan juga harus mengandung kesinambungan.

Menurut pandangan SBY, penyelamatan dan pengembangan Indonesia dari keterpurukan harus menjadi tema terbesar memasuki reformasi tahap kedua, menurut SBY penyelamatan ini menjadi tugas pemimpin negara, siapapun yang menjadi presiden dari hasil pemilu 2004 harus mengambil alih peran dan fungsi untuk menjamin kesinambungan dari tahun 2004 sampai seterusnya agar republik Indonesia tetap berdiri kokoh dan menjadi negara nasional sesuai dengan proklamasi pada 17 agustus 1945. Penyelamatan dan pembangunan Indonesia kembali merupakan kerja yang sesungguhnya dari kabinet mendatang hasil pemilu 2004.

Untuk merawat dan membangun kembali Indonesia menurut pandangan SBY sangat membutuhkan pemerintahan yang kuat, transparan dan akuntabel. Dimana pemerintah harus dapat merespon aspirasi rakyat menjadi program yang berbentuk, karena rakyat pantas untuk mengetahui semua kegiatan pemerintah. Pemerintah pun tidak boleh bekerja didalam ruangan tertutup dan terpisah dengan lingkungan masyarakat luas, kecuali hal yang bersifat rahasia negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode history atau metode sejarah dengan pendekatan studi pustaka. Menurut Mulyana tahun 2007 mengungkapkan ada 4 langkah dalam sebuah penelitian sejarah yaitu, Heuristik, Kritik Sumber atau ferifikasi, dan interpretasi (Mulyana, 2004:145)

Sebagai langkah awal dalam sebuah penelitian ini yaitu pengumpulan sumber yang berkaitan dengan judul yang ditulis yaitu “ Menganalisis Perjuangan Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Merawat Demokrasi di Indonesia, sumber yang peneliti dapatkan dari Buku-Buku, Artikel-artikel dan Jurnal yang berkaitan dengan judul yang peneliti buat, langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah kritik sumber dan interpetasi dimana pada tahap ini penulis menggunakan data-data dengan sumber yang valid dan tidak akan digunakan, peneliti juga melakukan penafsiran terhadap data yang terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan SBY mulai dari analisis sistem pemerintahan era SBY sampai dengan pemerintahan SBY dan politik luar negeri Indonesia. Kemudian langkah trakhir yaitu histografi yaitu menulis hasil dari penelitian yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden Republik Indonesia ke enam dan merupakan salah satu presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Dan wakil presiden Drs. M. Jusuf Kalla, SBY terpilih sebagai presiden pada tahun 2004 yang mengusng agenda “ Indonesia yang lebh adil, damai, sejahtera dan demokratis” Kemudian pada tanggal 20 oktober 2009, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih dan dilantik lagi sebagai presiden RI priode 2009-2014 dengan wakil presiden Prof. Dr. Boediman.

Susilo Bambang Yudhoyono atau sering di sebutr dengan SBY, lahir pada 9 september 1949 di pacitan, jawa Timur. SBY merupakan seorang ilmuwan teruji, dimana beliau merai gelar Master Management dari Webster University di Amerika Serikat pada tahun 1991 dan setelah itu melanjut studinya di Institut Pertanian Bogor dan pada tahun 2004 merai gelar Doktor Ekonomi Pertanian, tahun 2005 SBY mendapatkan anugrah dua Doctor Honoris Causa, kemudian untuk Ilmu Hukum SBY melaksanakan studi di Almaternya Webster University dan untuk ilmu politik SBY melaksanakan pendidikan di Thammasat University di Thailand.

SBY merupakan seorang yang berhasil menjadi lulusan terbaik di AKABRI Darat pada tahun 1973 dan mengabdikan sebagai perwira TNI selama 27 tahun. SBY sendiri telah meraih pangkat Jendral TNI pada tahun 2000. SBY telah melakukan perjalanan yang cukup panjang dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan di Indonesia dan juga luar negeri, seperti Seskoad. SBY sendiri pernah menjadi Command and General Staff Collagen di Amerika Serikat. Pada saat penugasan militer SBY menjadi Komandan Pasukan dan Terirotial, Perwira Staf, pelatihan dan dosen pada daerah operasi ataupun markas besar. SBY juga pernah ditugaskan di Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad, Panglima Kodam Sriwijaya dan Kepala Staf Terirotial TNI.

Selain di negri sendiri SBY juga pernah bekerja pada misi-misi luar negeri, yaitu ketika menjadi Chief Military Observar United Nation Peace Keping

Operations (CMO UNPKO) dan Kontingen Indonesia di Bosnia Herzegovina pada tahun (1995-1996). Selesai nya mengabdikan sebagai perwira TNI selama 27 tahun, SBY mendapatkan masa pensiun menjadi lebih awal yaitu 5 tahun ketika sedang menjabat menteri pada tahun 2000. Karena pengabdianya SBY mendapatkan 24 tanda penghormatan dan bintang jasa, yaitu Lencana PBB UNPKF, Bintang Darma dan Bintang Maha Putra Adipurna. Penghargaan tersebut diberikan atas jasa-jasa melebihi panggilan tugas, SBY merupakan orang yang mendapatkan Bintang Jasa tertinggi di Indonesia yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna.

Kemudian sebelum dipilih rakyat dalam sebuah pemilihan presiden secara langsung, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pernah melaksanakan tugas-tugas dalam pemerintahan , salah satunya sebagai menteri pertambangan dan energy serta menteri koordinator politik, sosial dan keamanan pada kabinet persatuan Nasional pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. SBY juga sebagai menteri politik dan keamanan dalam kabinet gotong-royong dimasa presiden megawati, ketika menduduki sebagai menteri koordinasi SBY dikenal dunia internasional karena memimpin Indonesia dalam memerangi terorisme.

SBY dikenal aktif dalam beberapa organisasi masyarakat. SBY pernah menjabat sebagai Co-Chairman of the Governing Board of the Partnership for the Governance Reform, yaitu upaya bersama Indonesia dan organisasi berupaya meningkatkan pemerintahan di Indonesia. Dimana SBY sebagai ketua dewan pembinaan di Brighten, sebuah lembaga yang membahas kajian teori dan praktik pembangunan nasional.

Dilihat dari beberapa tahun terakhir, SBY pernah berperan aktif di sebuah forum Internasional, dalam rangka menyelamatkan lingkungan hidup, yang dilaksanakan konferensi Bali mengenai perubahan iklim tahun 2007 yang menghasilkan Bali Road Map. SBY juga memprakarsai terbentuknya Coral Triangle Initiative, yaitu upaya kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Philipina, Papua Nugini, dan Brunei Darussalam dalam rangka melindungi keanekaragaman

terbentuknya florest-11 tau F-11 yaitu kelompok negara yang mempunyai hutan tropis didunia.

SBY merupakan seorang yang senang membaca dan mempunyai belasan ribu buku, selain itu SBY sudah banyak menulis beberapa buku dan artikel seperti : Transformong Indonesia : Selected Internasional Speeches (2005), Make of a hero (2005) dan taman kehidupan, yaitu sebuah antopologi yang telah tulis pada tahun 2004. SBY merupakan seorang penulis pasih berbahasa inggris. SBY sendiri merupakan muslim yang sangat taat, SBY menikah dengan Ani Herrawati dan dikaruniai dua orang putra. Yang pertama Kapten Inf Agus Harimurti Yudhoyono dan yang Kedua, Edie Baskoro Yudhoyono.

Perjuangan SBY dalam Merawat Demokrasi Indonesia

a. Awal Karir Kabinet

Pada saat presiden Soeharto mendirikan sebuah kabinet pembangunan VII, pada bulan Maret 1998. SBY menjadi salah satu nominasi yang akan menduduki menteri penerangan, dimana Jendral Berbintang dua ini pada saat itu masih menjabat Asisten Sosial dan Politik (Asosspol) Kassospol ABRI dan usianya baru memijak 47 tahun dan pada saat presiden Habibie muncul mewakili Soeharto pada mei 1998. Nama SBY juga menjadi calon untuk menduduki menteri dalam negeri bersama dengan seniornya dan atas kemauan presiden Abdurrahman wahid SBY diangkat menjadi menteri Pertambangan dan Energi.

Ketik presiden Abdurrahman Wahid melantik Kabinet Persatuan Nasional pada oktober 1999. SBY menjadi salah satu didalamnya, SBY sendiri dipercayai untuk menjadi mentamben dimana tugas yang baru yang belum sama sekali SBY sentuh. Jabatan ini pun diserah terima dari pejabat lama yaitu Kuntoro Mangunsubroto kepada Susilo Bambang Yudhoyono.

Untuk menghadapi tugasnya yang baru SBY harus terpacu dengan waktu, hal ini karena tantangan yang dihadapi jajaran pertambangan cukup kompleks, karena SBY harus menyesuaikan dengan ritme pekerjaannya yang baru. SBY sangat menyadari sebagai seorang militer yang mana tidak mempunyai latar

belakang dibidang pertambangan sangat banyak sekali hal yang harus SBY pelajari mengenai hal-hal yang bersifat petambangan supaya SBY dapat memberi inspirasi dan motivasi dalam mendorong departemen dan meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan tuntutan reformasi, ada tiga misi yang di emban dalam pembangunan sektor pertambangan, yang pertama, pemberdayaan kerakyatan berbasis SDM (Sumber Daya Manusia) dalam hal ini dapat memberikan indikasi usaha disektor pertambangan dan energy yang harus memperdayakan seluruh komponen masyarakat, baik pengusaha ataupun koperasi. Kedua, membentuk pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Dalam hal ini aparat harus senantiasa bersih, transparan, dan menjauhkan hal-hal yang berbau kolusi, korupsi dan nepotisme. Ketiga, pradigma pemerintah daerah, dimana departemen pertambangan dan energy akan mendelegasikan kewenangan dibidang pertmbangan dan energy pada pemerintah daerah secara bertahap.

Misi ini menjadilandakan bagi SBY untuk memimpin sebuah departemen yang mana mempunyai peran yang strategis di negeri ini. misi inilah yang menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan di sektor pertambangan dan energy secara demokratis dan dapat berdaya saing tinggi. SBY merupakan orang yang dikenal baru dalam bidang pertambangan, namun awal kehadiran SBY di Departemen Pertambangan ini memberikan warna baru, Karen SBY sendiri merupakan seorang militer yang mempunyai kedisiplinan yang cukup tinggi. SBY dapat memnyesuaikan terhadap kinerja pegawai negara dan tidak membuatnya menerapkan kultur militer yang kaku.

Jajaran departemen pertambangan merakan bahwa SBY memiliki leadership yang kuat, yang mana dapat menerapkan Human relations yang tinggi, sehingga hubungan antara atasan dan bawahan tercipta secara dinamis.karena untuk mengakrabkan hubungan didalam lingkungan kerja SBY tidak terlalu bersikap formalitas. Karena SBY merupakan orang yang termasuk cepat dalam menyesuaikan dengan bidang tugasnya, hal itu dirasakan sendiri para stafnya, ketika pertama kali memulai tugasnya sebagai menteri pertambangan dan energy SBY harus mendatangi sejumlah even penting seperti konferensi yang bersifat

Nasional maupun internasional yang mana dihadiri oleh eksekutif asing dari berbagai perusahaan.

Pada saat sidang OPEC yang dilaksanakan di Wina, Australia. SBY mampu membawakan diri Sebagai menteri pertambangan yang cukup moderat hingga bisa menjadi penengah, karena yang kita ketahui OPEC memiliki dua kelompok yang berbeda pandangan dan kepentingan. Kelompok pertama yaitu Saudi Arabian, Kwait dan Qatar mempunyai cadangan minyak yang berlimpah mengingat untuk memproduksi minyak sebanyak-banyaknya agar harga minyak dipasaran dunia tidak terlalu tinggi dapat membuat dampak negatif bagi industry minyak dalam jangka yang cukup panjang, sementara kelompok kedua terdiri dari Irak, Aljazair dan Libyan mempunyai cadangan minyak yang tidak terlalu banyak sehingga menginginkan produksi rendah untuk merangsang di pasar dunia, karena bagi mereka minyak merupakan penyumbang devisa bagi negara.

Sementara Indonesia sendiri terletak pada posisi negara yang menginginkan produksi minyak yang rendah agar dapat merangsa harga dipasar dunia. Indonesi selalu *reasonable*, tidak mau terperosok dalam tarik menarik oleh dua kubu ekstrim tersebut. Dalam sidang OPEC SBY mendapatkan tempat yang cukup baik, dimana SBY memainkan peran untuk membangun konsensus dan mencairkan kebekuan. Sebuah peran yang dimainkan SBY secara cantik ketika mengawali karirnya sebagai Mentaben. Persoalan semacam ini merupakan hal yang tidak mudah apalagi SBY bukan seorang menteri yang mempunyai latar belakang di bidang pertambangan. SBY mempunyai speed yang sangat cepat melakukan adaptasi meski tidak mempunyai latar belakang dibidang pertambangan tetapi SBY mampu memainkan peran yang terbilang cukup strategis.

Belum sampai satu bulan menjadi seorang menteri pertambangan dan energy, SBY mendapat sebuah mandat dari presiden Abdurrahman Wahid untuk melakukan kunjungan misi ke negara irak. Di negri Saddam Hussein, SBY mengemban sebuah misi mencari peluang usaha yang berkaitan dengan *oil for food* karena sejak Irak menginvasi Kuwait pada tahun 1999, PBB membango

negeri Seribu Satu Malam, karena membantu masyarakat Irak dimana PBB memberlakukan kebijakan *oil for food* Irak bisa mengekspor minyak secara terbatas untuk dapat membeli makanan dan obat-obatan bagi rakyatnya.

Dalam kaitan dengan *oil for food*, Indonesia telah mengekspor bahan pangan dan obat-obatan ke negerinya Saddam Husein, dilain pihak Indonesia tidak pernah mendapatkan minyak dari Irak, padahal minyak Irak relatif cukup bagus dan harganya cukup tinggi dipasar internasional. Jika Indonesia mendapatkan minyak dari Irak, kemudian mengolah dan menjualnya kembali ke pasar internasional agar bisa menambah devisa negara.

Selama berada di Irak, SBY melakukan negosiasi dengan menteri perminyakan Irak, supaya Indonesia bisa mendapatkan jatah minyak Irak yang dijual untuk membeli bahan makanan dan obat-obatan. Sebagai wakil pemerintah SBY menjadi fasilitator agar para pengusaha Indonesia supaya dapat mengakses impor minyak dengan meningkatkan volume ekspor bahan pangan dan obat-obatan. Sedangkan berkaitan dengan Pertamina SBY memperjuangkan supaya usaha milik pemerintah bisa mendapatkan nonblok (Konsensi Wilayah Kerja) di negeri tersebut.

b. Kenaikan TDL dan BBM

Sebagai menteri yang berugas di pertambangan dan energi, pada awal perbaikan, bidang tugas yang di emban SBY ternyata memegang hal-hal yang sangat pekat didalam masyarakat. Ketika pemerintah menghadapi kesulitan dalam memperkora, mengenai akibat krisis ekonomi, maka pemerintah memberhentikan berbagai macam bentuk subsidi. Termasuk subsidi tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi kewenangan departemen teknis, yaitu Departemen Pertambangan dan Energi. SBY sebagai menteri pertambangan dan energy dan sebagai penanggung jawab dibidang pertambangan dan energy SBY tidak boleh menyerah menghadapi keputusan pemerintah ini tidak populer dan akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat, karena hal itu harus dilakukan jika rakyat ingin keluar dari kerisis.

SBY sebagai seorang menteri yang pemimpin yang harus mengambil keputusan untuk melakukan sosialisasi mengenai kenaikan BBM dan TDL dengan membentuk tim sosialisasi TDL dan BBM agar memberikan sosialisasi kepada

masyarakat mengapa subsidi harus dicabut serta berbagai upaya yang akan dilakukan pemerintah. Kemudian pada era reformasi SBY menjadi pionir dalam melakukan sosialisasi kepada kebijakan publik, SBY merupakan menteri yang pertama kali melakukan kebijakan public secara program dan terarah secara sistematis. Sehingga mengenai kebijakan kenaikan TDL dan BBM tidak hanya DPR yang memberi keritik, pandangan dan usulan melainkan seluruh masyarakat.

Serta upaya SBY dalam mensosialisasikan pencabutan subsidi BBM, menangkap tuntutan rakyat dimana Pertamina menjadi peran utama dalam pengelola BBM dan sebagai menteri yang memahami betul aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan momentum ini untuk mendorong Pertamina melakukan rekonstruksi. Dimana untuk mendorong Pertamina melakukan rekonstruksi pada saat serah trima jabatan Direktur Utama Pertamina dari Martiono Hadianto kepada pejabat baru yaitu Baihaki Hakim pada 1 Maret 2000. Cara SBY memanfaatkan momentum tersebut dengan membangkitkan semangat jajaran BUMN dengan khusus SBY meminta kepada Baihaki dalam waktu tiga bulan bisa menyiapkan cetak biru Pertamina.

Sebagai seorang menteri yang mempunyai tanggung jawab dalam mendorong pembangunan pertambangan dan energi yang demokratis serta berdaya saing tinggi. SBY memerlukan perangkat UU yang lebih kondusif terhadap tuntutan reformasi. Setelah beberapa dekade sejak diberlakukannya Prp No 44 tahun 1960, mengenai pertambangan minyak dan gas bumi dan UU No 8 Tahun 1971, tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara dalam pelaksanaannya terdapat kendala. Dimana subsidi kedua UU ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dimasa yang akan datang. Karena dalam mendorong kebutuhan dan tantangan yang mendunia, kegiatan minyak dan gas diminta agar lebih mampu mendukung kelangsungan pembangunan nasional dalam pengembangan kedamaian dan ketentraman rakyat.

Seiring mengenai kebijakan pemerintah mengenai subsidi BBM , SBY juga mengalami permasalahan mengenai Stok BBM harus di berikan perhatian penuh supaya tidak mengalami kesulitan stok agar tidak berubah menjadi krisis dan bekerja keras dengan Pertamina supaya terurus melakukan upaya antisipasi. Banyak sekali faktor yang memicu krisis BBM sebelum pemerintah

membatalkan kenaikan BBM pada april tahun 2000, muncul lah masalah mengenai pengoplosan dan penyeludupan BBM. SBY pun memberikan perhatian penuh dalam mengatasi masalah ini dengan membentuk tim terpadu, jika pengoplosan dan penyeleludupan ini dibiarkan akan membuat negara rugi dan kehilangan stok nasional.

SBY merasa sangat khawatir karena mengatasi penyeludupan dan pengoplosan di perkirakan akan selesai dalam satu bulan namun ketika para engineering melakukan perawatan menemukan beberapa unit mengalami kerusakan berat dan perbaikan menjadi molor selama tiga bulan. Komdisi ini membuat SBY mulai mengkordinasi dengan pertamina untuk mengatasi masalah supla ini. langkah kordinasi ini harus bisa mengatasi suplai hingga pertengahan juni. tetapi ditengah kerja keras tersebut pada juni terjadi kebakaran kilang Al Achmadi di Kuwait. Masalahnya menurut SBY pada saat kilang Kuwait terbakar, di Amerikan utara sedang mengalami musim panas yang membuat penduduk Amrika Utara berpergian sehingga kebutuhan premium meningkat, sedangkan untuk mengatasi lonjakan permintaan premium mereka membeli minyak tiga bulan sebelumnya. Komdisi inilah yang membuat Indonesia tidak mudah mencari jalan karena banyak negara penghasil minyak sudah terikat dengan komitmen dengan negri Paman Sham.

Hal ini membuat SBY harus bekerja keras mengatasi masalah ini, karena kebijakan stok BBM secara nasional mengalami perubahan, karena sebelum krisis terjadi stok BBM secara Nasional 23 hari, karena setelah krisis kebijakan tersebut di evaluasi, Price Water House (PWC) misalnya mengajurkan stok BBM itu cukup 17 hari sehingga sedikit moderat. Untuk mengatasi kelangkaan pasokan BBM, SBY memerintah pertamina untuk melakukan inpor dari luar negeri, tidak perlu untung, rugi, yang terpenting masyarakat bisa mendapatkan BBM mudah, Singapura biasanya bisa mengalirkan BBM ke Indonesia, namun kali ini tampaknya susah untuk mengalirkan BBM ke Indonesia.

Akibat berbagai faktor yang saling menyusul SBY memutuskan minyak dari kilang Cilacap dan Balikpapan yang awalnya untuk memasok kawasan Indonesia tengah dan timur, terpaksa sebagian harus dibelokkan kearah barat, untuk mengisi kekosongan di Balongan. Sebagai penanggung jawab tertinggi di

departemen pertambangan, SBY membentuk prioritas mana daerah yang tidak boleh mengalami krisis BBM. Jakarta menjadi salah satu pusat yang tidak boleh mengalami krisis BBM. Langkah ini bukan untuk mengesampingkan beberapa daerah, tetapi merupakan cara untuk mengatasi krisis BBM di berbagai daerah.

c. Menuju Indonesia Baru

Kemudian memasuki abad ke-21 Indonesia mengalami kekoncangan dimana menyusulnya presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan, seakan negeri ini mengalami diskontinuitas, karena rakyat mengalami ketidakpastian dan kemudian muncul gerakan “pembebasan” yaitu munculnya wacana baru, yaitu mendekonstruksi Indonesia masa lampau dan kemudian membangunnya kembali menjadi Indonesia baru yang di dambakan bersama.

Dalam membangun Indonesia yang baru tentu tidak melepaskan Indonesia masa lalu, walaupun masa lalu itu tidak mengenakan. Untuk membangun Indonesia baru harus berdasarkan pada ideology dan cita-cita nasional yang telah ditetapkan oleh pendiri negeri, seperti halnya di negara Amerika dan Eropa nilai-nilai karakter kebangsaan diletakkan pada warisan suci yang menjiwai dan menafasi perjalanan bangsa. Dengan diletakkannya nilai tersebut diharapkan dapat menembus tantangan-tantangan generasi demi generasi.

Belajar dari negara-negara besar ini lah SBY merasa risau, karena ketika menyaksikan di era reformasi, seolah-olah alergi dan tidak ingin membicarakan dan berdialog mengenai cita-cita nasional, karena warisan orde baru menganggap kata-kata seperti kepentingan nasional, pembangunan, dan stabilitas dianggap sebagai jagoan rezim lama yang harus dikubur dalam-dalam. Karena secara jujur SBY mengakui dimasa lampau ada beberapa hal manipulasi dan politisasi terhadap makna dan ideology pancasila, serta UUD 1945. Untuk membangun Indonesia baru, SBY melihat bangsa ini perlu mengangkat dan menyegarkan kembali cita-cita dan tujuan nasional. Karena konstitusi telah meletakkan cita-cita kita sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Untuk membangun Indonesia baru, SBY melihat bangsa ini harus bertumpu pada tiga nilai kebangsaan yaitu cita-cita, dasar negara dan tujuan nasional. Agar setiap generasi yang melangkah besar harus mendasarkan pada nilai kebangsaan jika tidak ingin kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia,

termasuk dalam merekonstruksi Indonesia yang lama dan membangun Indonesia yang baru. SBY melihat kembali tugas generasi abad ke-21 harus berjuang mewujudkan Indonesia yang stabil, Demokratis dan sejahtera. Jika ingin menghadirkan nilai-nilai kebangsaan, ketentraman dan kebangsaan yang mana menjadi ukuran masyarakat global, ketika ingin membangun masyarakat yang baik, ekonomi, politik yang baik juga.

Demokrasi yang baik sebagaimana rumusan Liz dan Stepan tentu sangat relevan dikembangkan di Indonesia walaupun mempunyai tantangan yang cukup besar, hal itu harus menjadi agenda nasional utama dimasa yang akan datang. Indonesia dimasa mendatang harus bisa membangun demokrasi yang sejati, disamping tumbuhnya stabilitas dan ekonomi yang baik.

SBY mencoba merumuskan Indonesia baru yang dapat dikembangkan dan dibangun paling tidak memiliki kondisi yang ideal seperti: pertama, Sistem dan institusi kenegaraan dan kemasyarakatan yang telah berada pada posisi yang mapan. kedua, penyimpanan dalam konsepsi, tatanan dan praktek kebangsaan yang dicita-citakan negara proklamasi 1945 dapat dihilangkan dan diluruskan kembali. Ketiga, Indonesia mampu tampil dalam percaturan global secara terhormat, kontribusi dan berdaya saing sesuai nilai-nilai kebangsaan. Keempat, Indonesia semakin maju, mandiri, aman, adil dan makmur. Kelima. Sembilan pilar negara semakin tegak, membumi dan teraplikasi secara luas dalam sendi kehidupan.

SBY menyadari, Kriteria Indonesia baru yang diajukan itu sangatlah ideal, bahkan dianggap sebagai utopia yang sulit menjadi kenyataan, tetapi SBY mengingatkan harus menjadi bangsa yang besar dan harus berfikir besar serta mau pula berkarya besar. Kondisi ini menjadi tugas setiap generasi yang akan datang dalam mewujudkannya. Tetapi SBY juga melihat salah satu tugas besar abad ke-21 adalah menghidupkan kesadaran bersama agar dapat melanjutkan pembangunan bangsa yang memiliki nilai karakter jati diri yang baik, terutama dari segi masyarakat, SBY memforumkan bangsa ini harus bisa membangun masyarakat yang sipil dan madani. Yaitu masyarakat yang lebih berdaya dan diberdayakan agar dapat mengatur kehidupan sendiri.

Dalam jangka pendek dan menengah, titik berat sebuah reformasi harus berada pada bidang hukum, ekonomi dan politik. Di bidang hukum, yang harus diadakan adalah keadilan, ketentraman, kepatian dan ketertiban umum. Dan perangkat hukum harus dikemas dan ditegakkan dan diskriminasi hukum harus di hentikan. Selanjutnya pada bidang ekonomi, bangsa harus menuju pada terbangunnya kehidupan ekonomi nasional yang adil, stabil, namun tetap tumbuh dan merata. Kinerja mikro ekonomi dan fundamental harus dapat ditingkatkan kembali. Selanjutnya di bidang politik, reformasi diarahkan agar dapat mewujudkan masyarakat madani yang demokratis, yang mana pada format politik dikembangkan mencakup terbangunnya hubungan yang sehat dan sistematis antara lembaga negara, termasuk berlangsungnya *check and balances* antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Bersamaan dengan bergulirnya reformasi, SBY merasakan kran demokrasi mulai terbuka secara lebar, sehingga muncul kesan dimana Indonesia mulai menerapkan sistem demokrasi liberal. Indonesia mempunyai cerita tersendiri mengenai dinamika pasang surut demokrasi, bagi SBY, Indonesia yang pluralistik serasi akan konflik karena kemajemukan yang ada. Dimana Indonesia mempunyai kemajemukan ideologi, konflik politik, konflik sosial harus mempunyai sistem yang benar-benar cocok. Memperaktikan demokrasi liberal, bahkan sangat liberal, pasti akan bertentangan dengan kondisi yang nyata bangsa ini. Kembali lagi pada sistem otoritarian, yang mana membungkam kebebasan, hak asasi manusia dan demokrasi, akan menyimpan ledakan-ledakan yang baru dimasa yang akan datang.

SBY melihat, harus adanya kesinambungan antara demokrasi yang liberal dengan tatanan yang otoritatif meskipun bukan semi otoritarian. SBY perlu menganjurkan dibangunnya sistem dan model demokrasi yang disatu sisi, demokrasi, hak asasi manusia dan *civili society* yang harus terus dikembangkan. Disisi lain, stabilitas, keamanan dan tertib sosial juga harus dipertahankan. Dimana dibangun dan dikembangkan di negeri ini agar lebih dari sekedar norma-norma konvensional dari sebuah kehidupan demokrasi.

Karakteristik Kepemimpinan SBY

Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disebut dengan SBY mempunyai karakter yang menjadikan beliau memiliki jiwa kepemimpinan bagi masyarakat ataupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena dalam mengambi atau memimpin SBY memegang prinsip setiap menyelesaikan konflik harus mengutamakan pendekatan mengajak ketetapan yang bersifat Win-Win Solution. Prinsip inilah yang dipegang untuk menjaga ke utuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu cara kepemimpinan SBY merupakan kepemimpinan yang cocok diterapkan di Indonesia, karena kepribadian SBY yang tegas, pemikir dan detail. Yang membuat dirinya teliti dalam menyelesaikan berbagai masalah dan setiap mengambil keputusan SBY mempunyai solusi. Dalam melaksanakan rapat terutama dalam hal memikirkan, dilihat pada saat pembentukan atau perancangan kabinet barunya SBY lebih memperhatikan para tamu malang yang berada diruang tamu dari pada mentri-mentrinya yang menunggu wawancara. Kemudian saat membuat suatu keputusan SBY merupakan sosok yang tegas karena SBY mempunyai pemikiran yang berkesinambungan dengan kalimat SBY yang berfokus pada misi untuk menyelamatkan rakyat bukan berpolitik. Dimana SBY pernah mengatakan bahwa kita harus berpikir terang, karena ini bukan perang, bukan pelatiohan, bukan analisis. Bukan konflik. Bukan persaingan ataupun geopolitik.Selain itu, budaya kepemimpinan yang sangat sulit tumbuh dalam tubuh pemerintahan. Memperlihatkan kepemimpinan SBY yang tegas dimana SBY merancang sebuah program kreatif untuk menciptakan demokrasi secara langsung yang mana membuka akses bagi rakyat untuk rakyat agar saling berhubungan dengan presiden.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono merupakan seorang tokoh pemimpin yang yang berkepribadian tegas, pemikir dan detail. Pada saat membuat suatu keputusan SBY merupakan sosok yang tegas karena SBY mempunyai pemikiran yang berkesinambungan dengan kalimat SBY yang berfokus pada misi untuk

menyelamatkan rakyat bukan berpolitik. Dimana SBY pernah mengatakan bahwa kita harus berpikir terang, karena ini bukan perang, bukan pelatihan, bukan analisis. Bukan konflik. Bukan persaingan ataupun geopolitik. Karena dalam mengambi atau memimpin SBY memegang prinsip setiap menyelesaikan konflik harus mengutamakan pendekatan mengajak ketetapan yang bersifat Win-Win Solution. Prinsip inilah yang dipegang untuk menjaga ke utuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Daftar Pustaka

- Eriyanto, 2002. Analisis Framing : Kontruksi Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta : LKiS Yogyakarta
- Hardi, Prasetyo, Buku Putih Departemen Pertambangan dan Energi Tahun 2000, (tt) Jakarta, 2000.
- Komisi Pemilihan Umum : Buku Evaluasi Pelanggaran dan Kecurangan Pemilihan Umum Tahun 1999, Jakarta, 2000.
- Musajabe, Herman, Mayor Jendral, Tantangan Pembangunan: Dinamika Pemikiran Seskoas 1992-1993, Forum Pengkajian Seskoad, Bandung, 1993.
- Mustofa, Kurdi dan A Yani Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono dalam 5 Hari Mandat Maklumat, Aksara Kurnia, Jakarta, 2003.
- Nyak Baik, Ridwan. Refleksi Transformasi Pertamina Dalam Editorial Buletin Pertamina 1998-2004, Humas Korporat PT Pertamina (Persero), Jakarta, 2000.